

ANTISIPASI PENUTUPAN SEMENTARA TPA PIYUNGAN

Lahan Transisi Mendesak Diperlukan

YOGYA (KR) - Keberadaan lahan transisi untuk pembuangan akhir sampah kini mendesak diperlukan. Hal tersebut sebagai alternatif ketika TPA Piyungan kembali ditutup sementara seperti saat ini.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Ahmad Haryoko, menjelaskan pihaknya sangat berharap agar lahan untuk kebutuhan transisi tempat pembuangan akhir bisa segera direalisasikan. "Jika tidak ada lahan untuk pembuangan sementara atau lahan transisi maka yang akan terjadi seperti arus lalu lintas, yakni buka tutup TPA Piyungan," jelasnya, Minggu (3/4).

Pada Jumat (1/4) hingga Minggu (3/4) kembali dilakukan penutupan sementara di TPA Piyungan dan pelayanan armada sampah akan dibuka kembali pada Senin (4/4). Penutupan pada awal bulan ini hanya berjarak sekitar 10 hari dari pe-

nutupan terakhir yang dilakukan pada 20 Maret 2022.

Sebelum penutupan dilakukan, lanjut Haryoko, sudah ada informasi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY selaku pelaksana revitalisasi TPA Piyungan agar pemerintah daerah bisa menyediakan lahan untuk TPA transisi pada 27 Maret. Penyediaan lahan transisi dibutuhkan karena ketinggian tumpukan sampah di TPA Piyungan saat ini sudah mencapai sekitar 140 meter sehingga berisiko longsor apabila tetap dilakukan pembuangan sampah. "Apalagi saat ini masih musim hujan sehingga TPA Piyungan perlu ditutup sementara untuk mengurangi risiko terjadinya longsor sampah," imbuhnya.

Sementara itu, lahan transisi yang disiapkan berada di sisi utara Zona A TPA Piyungan. Lahan tersebut berupa gundukan sehingga tetap perlu pengelolaan untuk mengoptimalkan pembuangan sampah. Akan tetapi tetap perlu diurug dan dibuat terasering. Pasalnya, jika sampah hanya dibuang dan ditumpuk maka dalam waktu kurang dari satu tahun sudah akan penuh.

Selain menyiapkan lahan transisi, Haryoko kembali mengingatkan masyarakat untuk mengintensifkan pengolahan sampah sejak dari rumah tangga guna mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan. Rata-rata volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan mencapai lebih dari 300 ton per hari. "Kami sudah banyak memberikan pelatihan pengolahan sampah organik ke masyarakat. Ada banyak cara yang bisa digunakan, mulai dari komposter, takakura, losida, hingga biopori," tandasnya. **(Dhi)-f**

Ramadan, Baznas Targetkan ZIS Rp 2,25 Miliar

YOGYA (KR) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogya menargetkan mampu menghimpun zakat, infak dan sodaqoh (ZIS) hingga Rp 2,25 miliar selama Ramadan tahun ini. Target tersebut merupakan 30 persen dari total target penerimaan zakat sepanjang tahun 2022.

"Penerimaan zakat selama Ramadan biasanya selalu mengalami kenaikan dibanding bulan-bulan lainnya. Makanya, kami targetkan penerimaan 30 persen dari target tahunan," jelas Ketua Baznas Kota Yogya Syamsul Azhari, Minggu (3/4).

Pada tahun ini, Baznas Kota Yogya menargetkan mampu menghimpun ZIS dan dana sosial kea-

gamaan lainnya (DSKL) hingga mencapai Rp 7,5 miliar. Target tersebut meningkat dibanding realisasi penerimaan pada 2021 sebesar Rp 5,9 miliar.

Syamsul menambahkan, untuk merealisasikan target tersebut sejumlah langkah diambil Baznas Kota Yogya seperti menyiapkan gerai-gerai pembayaran zakat di tempat umum. Gerai pembayaran zakat akan dibuka mulai 13 April hingga malam takbiran di antaranya di Pasar Beringharjo, Teras Malioboro 1 dan 2, serta di pusat perbelanjaan Jogjatronik.

Sebelumnya, Baznas Kota Yogya juga sudah membuka gerai di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogya yang berada

di kompleks Balaikota. Keberadaannya diharapkan semakin memudahkan umat Muslim memenuhi kewajiban mereka membayar zakat. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pembayaran zakat secara langsung melalui rekening Baznas Kota Yogya yang berada di berbagai bank.

ZIS dan DSKL yang masuk ke Baznas Kota Yogya akan dikelola untuk berbagai kegiatan seperti membantu masyarakat miskin, hingga membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. "Selama Ramadan biasanya juga banyak warga yang meminta-minta. Akan lebih baik bila menyalurkan sedekah langsung ke lembaga pengelola zakat

resmi supaya bantuan tersalurkan tepat sasaran," jelas Syamsul.

Sementara itu, Sekretaris Baznas Kota Yogya Misbachruddin mengatakan penerimaan zakat dari gerai-gerai zakat di tempat umum cukup signifikan. "Terkadang ada warga dari luar daerah yang kebetulan sedang berada di Yogyakarta dan kemudian menyalurkan zakat mereka dengan jumlah yang cukup besar," katanya yang menyebut sudah merekrut 30 relawan untuk operasional gerai zakat. **(Dhi)-f**



Pengurus Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta, setiap harinya mempersiapkan sebanyak 1.500 nasi bungkus untuk berbuka puasa. Tampak Agus Suratin, salah seorang petugas membagikan nasi bungkus kepada para jemaah.

KR- Franz Boedisukamanto

Bukber dan Pasar Ramadan Terapkan Prokes

YOGYA (KR) - Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan pelonggaran kepada masyarakat, dengan diperbolehkannya mudik serta berbagai aktivitas keagamaan, tak boleh menjadikan mereka lengah. Terutama yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes).

Untuk itu, berbagai kegiatan yang sering diadakan saat bulan suci Ramadan, seperti buka puasa bersama, salat tarawih serta pasar Ramadan atau pasar tiban wajib mengedepankan Prokes.

"Ramadan kali ini pemerintah memberikan sejumlah pelonggaran. Sehingga berbagai kegiatan yang sering diadakan saat Ramadan seperti buka bersama dan pasar Ramadan, boleh dilakukan, tapi tetap mengedepankan Prokes," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Minggu (3/4).

Diungkapkan, seiring dengan adanya sejumlah pelonggaran berdampak pada

peningkatan mobilitas masyarakat. Kondisi itu perlu diimbangi dengan peningkatan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam penerapan Prokes. Hal tersebut menjadi suatu keharusan, supaya terjadinya penambahan kasus atau klaster baru bisa ditekan. Bahkan untuk mengoptimalkan hal itu, keberadaan Satgas Covid-19 yang ada di tingkat desa atau kalurahan diminta proaktif dalam melakukan pengawasan. Semua itu untuk memastikan kegiatan yang diadakan masyarakat tak menimbulkan kerumunan.

Sebab, petugas Satpol PP tergolong minim sehingga tak bisa mengawasi seluruh kegiatan masyarakat. "Untuk pengawasan dan penegakan Prokes semua pihak harus terlibat. Karena tidak mungkin jika diserahkan sepenuhnya kepada Satpol PP. Pasalnya selain jumlah personelya terbatas, bersama Prokes menjadi tanggung jawab bersama," ungkapnya. **(Ria)-f**

KUATKAN RELASI INTERNASIONAL

SD Muhammadiyah Sapen Gelar International Friendship



KR-Istimewa

Kegiatan International Friendship and Cultural Camp Virtual Exchange 2022.

YOGYA (KR) - SD Muhammadiyah Sapen semakin meneguhkan dirinya untuk memperluas jejaring dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Setelah berkolaborasi dengan 12 sekolah di 10 negara yang tersebar di tiga benua, SD Muhammadiyah Sapen kembali berkolaborasi dengan salah satu sekolah kecemerlangan di negara serumpun Malaysia, SK Seksyen 13, Shah Alam.

Kolaborasi antara bangsa yang bertajuk International Friendship and Cultural Camp Virtual Exchange 2022 dilaksanakan secara virtual selama empat minggu. Kolaborasi diikuti sekira 70 siswa dan 7 guru dari kedua sekolah didesain dalam bentuk presentasi dan tanya jawab tentang berbagai subjek sosial dan budaya di kedua negara.

Iman Soleh SSM MPdI, Kabag Humas SD Muhammadiyah Sapen dalam siaran pers yang diterima *KR*, Minggu (3/4) menjelaskan, kegiatan berelasi internasional dimaksudkan untuk memberikan atmosfer yang kondusif kepada peserta didik kaitannya dengan penerapan pendidikan karakter berkebhinnekaan berwawasan global dan memberikan pengalaman belajar baru melalui komunikasi di antara peserta didik dua sekolah.

Sheranina Allysia Misha, salah seorang peserta mengakui kegiatan ini sangat bagus dapat memberikan kesempatan

seluas-luasnya kepada dirinya dan teman-temannya untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Peserta lain, Bima Sutan Ahza merasa sangat senang dirinya dapat mengeksklore lebih dalam tentang kedua sekolah.

"Saya sungguh merasa sangat beruntung dapat bergabung dalam kegiatan yang sangat luar biasa. Walaupun dilaksanakan secara virtual, tetapi saya merasa seolah sedang berada di SK Seksyen 13," ungkapnya.

Selama empat minggu siswa kedua sekolah saling berbagi dan menggali informasi tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat di kedua negara melalui presentasi dan tanya jawab menggunakan bahasa Inggris.

Kepala SD Muhammadiyah Sapen, Agung Rahmanto SH MPd menyatakan, kegiatan kolaborasi berelasi internasional merupakan suatu keniscayaan di era yang tidak terbatas. Karenanya siswa harus memiliki pengalaman belajar yang cukup tentang masalah-masalah sosial budaya negara lain. "Di era yang tidak terbatas, koneksi dengan masyarakat lain di belahan dunia manapun merupakan sebuah keniscayaan. Pemahaman tentang budaya baru menjadi sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik yang berkebhinnekaan berwawasan global," ungkapnya. **(Dev)-f**

ANAK KETURUNAN PKI BOLEH MENDAFTAR TNI

Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunis (GEPAKO) Gandung Pardiman : Pertahanan TNI Jebol Masalah PKI



KR-Istimewa

Drs HM Gandung Pardiman MM bersama anggota militan Gepako.

YOGYA (KR) - kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menyatakan bahwa anak keturunan PKI boleh mendaftarkan diri menjadi TNI menuai tanggapan dari berbagai pihak. Keputusan yang kontroversial dari Panglima TNI Andika Perkasa dalam beberapa hari terakhir ini menjadi pembicaraan hangat dan viral di sejumlah media sosial.

Ada yang menyatakan dengan tegas menolak kebijakan tersebut karena PKI sampai saat ini masih menjadi partai terlarang di negeri ini sesuai isi TAP MPRS / XXV/ 1966. Sementara beberapa pihak menyatakan setuju dengan keputusan yang diambil Panglima TNI mengenai proses penerimaan anggota TNI mengizinkan anak keturunan anggota PKI diperbolehkan mendaftar.

Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako) DIY Drs HM Gandung Pardiman MM menilai bahwa pertahanan TNI kini sudah jebol terkait masalah PKI. TNI sejak dahulu menjadi benteng pertahanan terhadap Pancasila, UUD 45 dan NKRI. " Saya melihat bahwa PKI masih ada karena para anggota PKI yang sudah meninggal atau yang kini masih hidup tentu memberikan pemahaman mengenai ideologi komunis kepada anak - anaknya. Sehingga orang - orang yang berada di lingkungan mantan anggota PKI tentu akan terpengaruh," ungkap Gandung Pardiman yang juga Anggota DPR RI dalam keterangan persnya jumat (1/4/2022).

Lebih lanjut Gandung Pardiman menyatakan dengan tegas menolak kebijakan Panglima TNI Andika Perkasa tersebut. Gandung menilai anak - anak anggota partai terlarang PKI baik secara langsung maupun tidak langsung, disengaja atau tidak disengaja pasti menerima pengaruh paham ideologi komunis

dari orang tuanya." Saya yakin baik secara langsung atau tidak, disengaja atau tidak paham ideologi komunis akan masuk kedalam otak sang anak dan paham ideologi komunis akan tertanam hingga menjadi dewasa," ujarnya politisi Partai Golkar yang bekerja dengan slogannya Ikhlas Berjuang Ikhlas Beramal Peduli Semua. Oleh karena itulah Gandung menghimbau kepada Panglima TNI untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar DIY itu yakin di keluarga besar TNI yang masih aktif maupun yang sudah purna tentu tak sedikit yang menolak terhadap kebijakan tersebut. "Apalagi mereka yang merasakan langsung akibat perbuatan keji PKI pada tahun 1965," tegasnya.

Gandung menambahkan, masalah ini pernah diangkat oleh mantan Wakil Presiden RI Jenderal Purnawirawan TNI Try Sutrisno yang pada tahun 2017 mengingatkan kepada TNI agar hati - hati dan waspada serta teliti agar anak - anak anggota PKI jangan sampai masuk TNI. " TNI selama ini adalah musuh utama PKI dan paham komunis.

Kami berharap jangan sampai TNI dihuni oleh orang - orang yang didalimi hatinya tertanam paham ideologi komunis. Hal ini bisa bahaya bagi TNI bangsa dan negara ini dimasa mendatang," tandasnya. Panglima Gepako Gandung Pardiman khawatir dimasa mendatang ada anggota TNI akan memunculkan jiwa dan semangat " Aku Bangsa Jadi Anak PKI ". Selain itu yang dikhawatirkan adalah jika anak - anak keturunan anggota PKI ini memegang jabatan strategis di tubuh TNI.

"Mirisnya lagi jika dikemudian hari anak anggota PKI yang jadi TNI ini memegang jabatan strategis. Ini tentu akan semakin merapuhkan ketahanan Pancasila di tubuh TNI bahkan memiliki potensi TNI akan terpecah," tandas Gandung. Selain itu, Gandung Pardiman juga mempertanyakan kebijakan ini apakah betul - betul dari institusi TNI atau pesanan dari pihak ketiga. " Ini konsep institusi TNI atau pesanan pihak ketiga. Hal ini tentu diketahui untuk rakyat Indonesia," pungkas Gandung Pardiman. **(*)**



KR-Istimewa

Drs HM Gandung Pardiman MM Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako)